

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH
KOTA BATAM**

SKRIPSI



**Oleh:
Kristina Napitupulu
140810170**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

**Kristina Napitupulu
140810170**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Kristina Napitupulu

NPM : 140810170

Fakultas : Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam ,02 February 2018

Materai 6000

Kristina Napitupulu

140810170

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
ANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

**Kristina Napitupulu
140810170**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini
Batam, 14 Maret 2018**

**Argo Putra Prima, S.E., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Kota Batam semakin berkembang dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi yang terarah. Mulai dari kepegawaian yang teratur sampai kepemimpinan yang sesuai aturan daerah otonom. Opsi pembangunan daerah menjadi topik yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Pembangunan daerah dilakukan berkelanjutan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang sejahtera. Salah satu upaya pemerintah yaitu menyediakan pembangunan yang ramah lingkungan dan review kebijakan yang prokontra lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *nonprobability sampling* dan dilanjutkan dengan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji pengaruh dan uji hipotesis. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Kota Batam Periode 2011-2015. Sampel yang digunakan adalah Pemerintah Kota Batam dan Dinas Pendapatan Asli Daerah serta Badan Pusat Statistik Kota Batam. Penelitian ini pada periode 2011-2015. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikan $0.002 < 0.05$, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikan $0.000 < 0.05$, Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikan 94,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

ABSTRACT

The city of Batam is growing with the existence of a directed decentralized government system. Starting from the staffing according to the rules of autonomous regions. Regional development is a very important topic for the government. Regional development is done continuously to achieve a prosperous economic growth. One of the government's efforts is to provide environmentally friendly development and environmental pro-contra policy review. This study aims to determine whether regional economic growth and local revenue affects the capital expenditure budget. Method of data analysis used in this research is quantitative method. Sampling technique used in this research is using nonprobability sampling and continued with descriptive analysis, classical assumption test, influence test and hypothesis test, population used in this research is report of realization of period 2011-2015. The sample used is government Batam city and local revenue service as well as statistical center of Batam City. This study is in the period 2011 – 2015. The type of data used is secondary data. The result of the research indicates that economic growth has significant effect to capital expenditure with significant value $0.002 < 0.005$, Local revenue affects capital expenditure with significant value $0.000 < 0.005$, While economic growth and local revenue together have significant influence to capital expenditure with value significant 94.9% while the rest influenced by other variables that are not examined.

Keywords : Economic Growth, Local Revenue, Capital Expenditure.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.
2. Ketua Program Studi Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI atas motivasi dan ilmu yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan dengan tepat waktu.
3. Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.Ak selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam yang telah memberikan motivasi dan bekal ilmu yang sangat bermamfaat kepada penulis.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah memberikan informasi kepada penulis selama kuliah di Universitas Putera Batam.

5. Terima kasih kepada orang tua yang selalu memberikan doa, semangat serta mensponsori penulis dalam materiil yang tidak akan pernah tergantikan sampai kapanpun.
6. Terimakasih kepada kakak dan abang penulis atas doa dan semangat yang tiada henti.
7. Terimakasih kepada Ibu mardiani sebagai salah satu pimpinan di perusahaan tempat penulis bekerja atas doa dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
8. Seluruh Pegawai Pemerintah Kota Batam dan Badan Pusat Statistik atas bantuannya dalam mempermudah penulis melakukan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi angkatan 2014 yang menjadi sahabat terbaik dalam susah dan senang sampai akhir menyelesaikan skripsi. Sukses selalu untuk kalian semua.
10. Sahabat-sahabat yang memberikan doa dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 14 Maret 2018

Kristina Napitupulu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Mamfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar.....	11
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah	11
2.1.1.1 Faktor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi	13
2.1.1.2 Elemen-Elementer Pertumbuhan Ekonomi Daerah	14
2.1.1.3 Model Pertumbuhan Ekonomi	16
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17
2.1.2.1 Klasifikasi Pendapatan Daerah	18
2.1.2.2 Pelaksanaan Pendapatan Daerah melalui Bendahara Penerimaan	20
2.1.3 Belanja Modal	21

2.1.3.1	Struktur Anggaran Belanja Modal Pemerintah.....	22
2.1.3.2	Peranan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah	23
2.2	Penelitian Terdahulu	38
2.3	Kerangka Pemikiran.....	26
2.3.1	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal.....	26
2.3.2	Hubungan PAD dengan Belanja Modal.....	27
2.3.1	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal.....	27
2.4	Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Desain Penelitian.....	29
3.2	Operasional Variabel.....	30
3.2.1	Variabel Bebas (Independent Variable).....	30
3.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	30
3.2.1.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30
3.2.2	Variabel Terikat (Dependent Variable).....	31
3.2.2.1	Belanja Modal	31
3.3	Populasi dan Sampel	32
3.3.1	Populasi.....	32
3.3.2	Sampel.....	32
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4.1	Metode Pengumpulan Data	34
3.4.2	Alat Pengumpulan Data	34
3.5	Metode Analisis Data.....	35
3.5.1	Analisis Deskriptif	35
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	36
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	36
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas	37
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	38
3.5.2.4	Uji Autokorelasi.....	38
3.5.3	Uji Pengaruh	39
3.5.3.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	39
3.5.4	Uji Hipotesis	41

3.5.4.1 Uji T (Parsial).....	42
3.5.4.1 Uji Simultan (Uji F)	43
3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	44
3.6. Lokasi Penelitian.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Analisis Deskriptif	46
4.1.2 Hasil uji Asumsi Klasik	47
4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas	47
4.1.2.1 Hasil Uji Multikolinearitas.....	50
4.1.2.1 Hasil Uji Heterokedastisitas	51
4.1.2.1 Hasil Uji Autokorelasi	53
4.1.3 Hasil Uji Analisis Linear Berganda	54
4.1.4 Hasil Uji Hipotesis	56
4.1.4.1 Hasil Uji Koefisien Secara Parsial (t)	57
4.1.4.2 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (F)	58
4.1.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	59
4.2 Pembahasan.....	60
4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal	60
4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X2) Terhadap Belanja Modal.....	62
4.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah.....	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 3. 1 Desain Penelitian.....	29
Gambar 4. 1 Histogram.....	48
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas-Normal Probability Plots	49
Gambar 4. 3 Uji Heterokedaksitas	52

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1 Tabel Durbin-Watson.....	38
Tabel 4. 1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian.....	46
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas-One Sample Kolomogorov Smirnov Test	50
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	51
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedaksitas-Park Gleyser	53
Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi	54
Tabel 4. 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	55
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (T).....	57
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Secara Simultan (F).....	59
Tabel 4. 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3. 1 Model Regresi Linear	40

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang penuh dengan keberagaman budaya, adat istiadat bahkan keberagaman bahasa. Perbedaan membawa perdamaian untuk semakin meningkatkan kerja sama antar daerah. Perencanaan organisasi sangat dibutuhkan untuk mengendalikan perubahan yang terjadi dimasa mendatang. Investasi di sektor manufaktur sangat bergejolak untuk perekonomian Batam. Kota Batam dikenal sebagai kawasan industri yang seharusnya bisa mendatangkan ribuan investor dengan jalur masuk yang strategis. Sumber daya alam dan sektor industri menjadi salah satu tahapan penting bagi perkembangan perekonomian. Di era globalisasi tantangan dalam dunia luar mendorong individu bahkan publik untuk bisa berinovasi dalam mencapai kesejahteraan hidup. Setiap individu diberikan pelatihan agar dapat menyeimbangkan budaya luar dan budaya dalam negeri serta bagaimana cara untuk bertahan hidup. Sasaran publik menjadi salah satu agen penting dalam pencapaian perekonomian daerah. Tidak semua yang dilakukan oleh rakyat mencakup hal yang positif namun di sisi lain terdapat sisi negatif penyimpangan individu terkhususnya dalam membangun kerangka sumber daya manusia. Publik dapat menciptakan kesempatan kerja yang baru dengan tenaga sumber daya alam. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar tetapi tidak jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa lampau diwaktu Johor dan

Riau masih merupakan Kerajaan Melayu. Kota Batam tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia dimana memiliki sistem pemerintahan desentralisasi.

Pemerintah Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983 yang bersifat Administratif dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan setingkat dengan Kabupaten/ Kotamadya Daerah tingkat II lainnya. Pemerintah Pusat dijadikan acuan untuk mengawasi dan membuat kebijakan dalam mengembangkan perekonomian daerahnya. Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 dijelaskan tentang otonomi daerah yang disebut hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap operasional daerah wajib mematuhi undang undang yang berlaku. Otonomi yang bertanggung jawab menjadi pemimpin pemerintahan daerah disertai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi aspek penting dalam pengawasan pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi Batam tidak terlepas dari kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Batam Otorita Batam yang disahkan oleh Pemerintah dalam mengurus urusan rumah tangga daerah.

Pertumbuhan ekonomi ditinjau dari kenaikan produk domestik regional bruto. Pertumbuhan ekonomi adalah aset yang sangat perlu dikembangkan.

Pertumbuhan ekonomi bisa berlangsung tidak maksimal dan bisa berlangsung maksimal tergantung bagaimana pihak di daerah memimpin perkembangan pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai salah satu aspek dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat mengakibatkan jumlah kemiskinan. Perekonomian menurun tidak terlepas dari permasalahan pemilik modal besar selalu mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan para pengusaha kecil dan menengah yang kekurangan modal. Pengusaha modal besar semakin memperluas bisnisnya dan pengusaha modal kecil sulit dalam meningkatkan usaha. Pengusaha modal kecil menjadi perhatian Pemerintah Pusat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas meningkatkan perekonomian yang lemah. Berbagai dana disalurkan kepada golongan ekonomi lemah untuk bisa memperbaharui usaha untuk semakin berkembang. Dana yang diterima merupakan sebagian dari anggaran belanja modal yang diberikan Pemerintah Pusat ke Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya. Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin memberikan peluang yang baik untuk suatu daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan publik, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Kebutuhan publik semakin hari semakin bertambah akibat gejolak dari budaya luar negeri. Pengembangan berbagai infrastruktur di Kota Batam adalah

salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya. Peningkatan infrastruktur termasuk salah satu tujuan otonomi daerah. Peningkatan infrastruktur dapat menarik para investor agar melakukan investasi. Semakin banyak Investor yang berinvestasi sangat mempengaruhi meningkatnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang semakin memadai mempermudah meringankan beban pemerintah daerah dalam menanggulangi upaya pemerataan kebutuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada peranan Pemerintah, sektor swasta dan budaya lingkungan.

Belanja infrastruktur termasuk dalam bagian belanja modal pemerintah kota Batam, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat memberikan kepedulian untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Multiplier belanja secara umum cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan multiplier pajak dan multiplier belanja modal cenderung lebih tinggi dibandingkan belanja rutin. Anggaran dalam belanja modal Pemerintah harus sesuai dengan pendapatan daerah dan dana yang diberikan Pemerintah Pusat ke Daerah. Dana yang diterima tidak menjadi akun utang yang harus dibayar selama periode waktu tertentu.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan yang sah diterima dari sumbangan yang diberikan berupa gedung yang telah disahkan.

Pendapatan asli daerah dapat dipergunakan untuk pelayanan kesejahteraan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu bentuk tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Pendapatan daerah pada umumnya belum maksimal untuk pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah yang berupa regulasi dari daerah untuk daerah masih memerlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam ditargetkan mencapai sembilan persen pada 2015, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Batam 2011-2015. Pertumbuhan di tahun 2016 diberikan pelayanan untuk lebih meningkatkan perekonomian daerah dengan melakukan survey ke daerah. Hasil survey diketahui peningkatan pendapatan daerah salah satunya adalah banyaknya investasi yang masuk kedaerah. Pemerintah Kota Batam terus berupaya untuk meningkatkan daerah dan memberikan pelayanan yang terbaik khususnya sektor yang memberikan banyak peluang masuknya pendapatan regional daerah.

Selain pendapatan asli daerah, sisa dana dari Pemerintah Pusat ke Daerah dari satu periode adalah salah satu bentuk pendapatan daerah untuk periode 2017. Pemerintah Daerah selain meninjau pendapatan daerah juga menanggulangi adanya pemborosan pemanfaatan dana untuk pembangunan ekonomi daerah. Anggaran daerah salah satu bentuk pelayanan publik. Keterbatasan sumber daya

adalah salah kesulitan dalam membiayai kebutuhan daerah. Perekonomian yang sulit dan sumber pendapatan yang tidak memadai secara langsung akan mempengaruhi kelangsungan hidup daerah. Dana transfer Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang berupa pendapatan belanja asli daerah untuk mendanai secara khusus urusan rumah tangga daerah. Setiap daerah mempunyai cara yang berbeda untuk menangani keuangannya dalam mendanai yang berhubungan dengan daerahnya.

Anggaran belanja modal digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik terutama sarana dan prasarana. Anggaran belanja modal sangat penting untuk meningkatkan aset tetap dalam menjalankan produktivitas daerah. Semakin tinggi tingkat perekonomian daerah maka akan semakin tinggi belanja modal daerah. Belanja modal diberikan untuk pelayanan publik yang bersifat sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas perekonomian daerah. Anggaran belanja modal disisi lain dapat menyokong pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Anggaran belanja modal dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan insfratuktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian didaerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang meninjau pada daerah kabupaten dan kota Batam ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan sumber daya yang dimiliki untuk belanja daerah

dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memilih judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Batam”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang diterapkan dalam target pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan perekonomian belum memperoleh output maksimal untuk dipergunakan publik.
2. Masih rendahnya sumber pendapatan asli daerah terutama dari ketersediaan sarana dan prasarana yang seharusnya bisa mengundang investor lebih banyak melakukan investasi.
3. Dana yang ditansfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah dalam satu periode masih perlu dilakukan penghematan/anggaran dalam belanja keperluan daerah terkhususnya aset tetap.
4. Rendahnya sumber daya manusia tentang perlunya pembangunan nasional dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah.

1.3 Batasan Masalah

Banyak masalah yang bisa diangkat untuk penulisan ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah dan berhasil yang terdiri dari:

1. Variabel independen (bebas) yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan variabel terikat adalah anggaran belanja pemerintah.
2. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Laporan Keuangan Realisasi Anggaran di Kota Batam pada tahun 2011-2015.
3. Penelitian ini hanya meneliti tentang Pertumbuhan Ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini beberapa hal yang ingin diketahui jawabannya, seperti yang sudah di singgung dalam latar belakang masalah, penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan pertanyaan seperti berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal pemerintah kota Batam?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal pemerintah kota Batam?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan belanja daerah secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal pemerintah kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan penjelasan tentang perekonomian Pemerintah Kota Batam yang ditinjau dari tingkat pendapatan asli daerah dari dampak pembangunan infrastruktur dan anggaran belanja modal. Adapun tujuan sesungguhnya dari penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal pemerintah kota Batam.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap terhadap anggaran belanja modal pemerintah kota Batam.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal pemerintah kota Batam.

1.6 Mamfaat Penelitian

Dari dilaksanakannya penelitian ini di harapkan ada beberapa manfaat yang bisa di ambil oleh beberapa pihak. Manfaat atau kegunaan yang bisa di ambil dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca secara teoritis tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja modal pemerintah kota Batam serta sebagai bahan pembandingan antara teori nyata dalam suatu organisasi yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penyusun

Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa menjawab masalah-masalah yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya. Selain itu juga diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pemahaman ilmu dan wawasan mengenai akuntansi pemerintahan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah referensi untuk penelitian sehingga memotivasi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik. Selain itu juga untuk dapat memperoleh data serta informasi mengenai Kota Batam.

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi yaitu menunjukkan kepada peningkatan produk nasional yang diukur dalam dolar yang tetap maupun konstan pada periode tertentu (Dadang Suhardan, 2012:27). Peningkatan produk nasional merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah pada tahun tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan ekonomi yang berlaku dalam satu tahun tertentu.

Menurut (Todaro & Stephen C. Smith, 2009:367) Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi untuk masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pelayanan Pemerintah Daerah sudah terlihat efisien. Hal ini ditinjau dari berkurangnya pencari kerja. Perekonomian berkembang dapat memberikan masukan positif bagi Kota Batam.

Pertumbuhan Ekonomi yaitu kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu perusahaan untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya dan kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi yang dimiliki oleh daerah (Jhingan, 2010 : 57).

Secara umum pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kapasitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi didukung dengan adanya pemerataan daerah untuk mempermudah mendapatkan kebutuhan pangan maupun sandang. Dalam pemerintahan sendiri sudah ada target yang sangat bijak untuk perlunya memperbaiki perekonomian. Pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan dengan cara mendapatkan kesejahteraan. Pelayanan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah harus lebih efektif, efisien, dan merata. Gambaran dalam pendapatan nasional tahun 2010 dijadikan kegiatan yang lebih produktif untuk tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi yang merata mencakup tiga aspek penting dalam mengutamakan pelayanan yaitu adalah sebagai berikut:

- a. *Input*
- b. *Output*
- c. *Outcome*

Input adalah pelayanan yang memerlukan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan. *Input* ditinjau dari kinerja dan cara melayani konsumen dengan baik. Pelayanan yang dihasilkan dan sudah dicapai dengan baik disebut *output*. *Output* tidak selalu menghasilkan pelayanan positif. *Output* bisa saja menimbulkan dampak yang negatif dan tergantung bagaimana pelaku sumber daya yang diberikan kewenangan melaksanakan pekerjaan daerah. Dampak yang ditimbulkan dari *output* disebut *outcome*. Berlakunya otonomi daerah dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri harus taat kepada peraturan daerah ataupun undang-undang yang berlaku di daerah.

2.1.1.1 Faktor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi

Undang – undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada Daerah, Kabupaten/Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dua hal yang harus dilakukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi terdiri:

1. Sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Globalisasi perekonomian memaksa semua pihak daerah untuk siap bersaing dan mencapai efisiensi di masa mendatang.
2. Penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertumbuhannya. Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi di era reformasi dapat mengembangkan proses berfikir untuk memahami tentang penggunaan aset daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2009:9) dalam upaya daerah harus bertumpu pada kepentingan publik untuk menumbuhkan perekonomian daerah tanpa mengorbankan aset yang dimiliki publik. Perspektif perubahan yang diinginkan terdiri:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlibat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, SEKDA dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaedah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD dan PNS Daerah
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur, anggaran kinerja dan anggaran multi tahunan
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi Pemerintah Daerah, laporan keuangan, peran DPRD
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat Pemerintah Daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen Pemerintah Daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

2.1.1.2 Elemen-Elemen Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan penduduk bukanlah penyebab utama rendahnya taraf hidup, ketimpangan ekstrem, atau terbatasnya kebebasan memilih yang terjadi di banyak

negara berkembang. Sebaliknya harus ada upaya mengidentifikasi penyebab utama masalah itu, terutama dalam keterpurukan keluarga miskin khususnya kegagalan aspek-aspek kebijakan pembangunan domestik dan internasional (Todaro & Stephen C. Smith, 2009:367).

1. Sumber-sumber Alam

Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral, tambang, iklim, dan lain-lain. Penyelenggaraan otonomi daerah lebih menitikberatkan peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk pembangunan ekonomi. Permasalahan dalam sumber daya alam terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan daerah. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan sumber tenaga manusia maka kendala sumber alam lebih serius.

2. Sumber-sumber Tenaga Kerja

Masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara sedang berkembang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah.

3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah

Penerapan konsep *value for money* (Ekonomis, Efisien dan Efektif) untuk pertumbuhan ekonomi daerah belum mencapai tingkat maksimal. Artinya, dalam mencari maupun menggunakan dana Pemerintah Daerah selalu dituntut untuk menerapkan *value for money*.

4. Akumulasi Kapital

Proyek infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi industri dan pengembangan serta pemasaran produk-produk sektor pertanian. Akumulasi kapital sering kali dipandang sebagai elemen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha-usaha untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memusatkan pada akumulasi kapital. Hal ini karena sebagian dari negara-negara berkembang mengalami kelangkaan barang-barang modal berupa mesin-mesin dan peralatan produksi, bangunan pabrik, fasilitas umum dan lain-lain. Penambahan dan perbaikan kualitas barang-barang modal sangat penting karena keterbatasan tersedianya tanah yang bisa ditanami.

2.1.1.3 Model Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi. Aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi seperti perkembangan pendidikan, perkembangan teknologi, peningkatan dalam kesehatan, peningkatan dalam infrastruktur yang tersedia dan peningkatan dalam pendapatan. Menurut (Imam Harjanto, 2011:76) terdapat model Pertumbuhan Ekonomi untuk menggambarkan peningkatan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

a. Model Pertumbuhan Harrot-Domar

Model ini menentukan besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk melihat tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi. Kualitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan dengan kenaikan efisiensi pendidikan dan latihan.

b. Model *Input-Output* Leontief

Model ini menekankan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri.

c. Model Pertumbuhan Lewis

Model ini khusus menerangkan kasus daerah yang sedang berkembang penduduknya. Tekanan yang muncul adalah pada perpindahan kelebihan penduduk di sektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Abdul Halim, 2008:96) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD terdiri atas:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut (Renyowijoyo, 2010:174) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 bahwa seluruh pendapatan daerah dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Hibah dimaksud adalah berupa bantuan uang, barang yang berasal dari Pemerintah maupun badan usaha. Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah

dari APBN kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu tidak dapat ditanggulangi APBD.

Menurut (Renyowijoyo, 2010:173) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Menurut (Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, 2009:40) Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah antara lain:

- a. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintha daerah lainnya serta dana otonomi khusus.

Pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan kemandirian lokal (Rahardjo Adisasmita, 2011:2).

2.1.2.1 Klasifikasi Pendapatan Daerah

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok

4. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan

daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari anggaran dan cicilan penjualan.

2.1.2.2 Pelaksanaan Pendapatan Daerah melalui Bendahara

Penerimaan

Sistem akuntansi keuangan Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007. Peraturan Menteri Keuangan berlaku untuk seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan dan yang bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran pembiayaan dan perhitungan untuk daerah. Menurut (Mahmudi, 2011:226) pelaksanaan penerimaan dana melalui Bendahara Penerimaan dilakukan dengan cara:

- a. Pengguna anggaran menyerahkan SKP daerah kepada Bendahara Penerimaan dan Wajib Pajak/Retribusi.
- b. Retribusi membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKP daerah kepada Bendahara Penerimaan.
- c. Bendahara Penerimaan memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang di terimanya dengan dokumen SKP yang diterimanya dari pengguna anggaran.
- d. Bank membuat nota kredit dan mengotorisasi STS. Nota kredit yang dikumpulkan dari sumber pendapatan daerah disampaikan kepada BUT.

2.1.3 Belanja Modal

Menurut (Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, 2009:290) belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, 2009:290).

2.1.3.1 Struktur Anggaran Belanja Modal Pemerintah

Menurut (Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, 2009:32) belanja modal pemerintah adalah untuk pelayanan publik dan menyediakan informasi berdasarkan tujuan atau fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah. Contoh fungsional misalnya untuk pendidikan atau lingkungan hidup. Klasifikasi ekonomi untuk belanja meliputi:

a. Kompensasi untuk pegawai

Kompensasi untuk pegawai adalah total gaji keseluruhan, baik dalam bentuk tunai maupun tidak, yang harus dibayarkan Pemerintah pada Pegawainya sebagai timbal balik atas pekerjaan yang telah dilakukan selama periode akuntansi.

b. Belanja barang dan jasa

Yang dimaksud barang dan jasa terdiri dari barang dan jasa yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lain, barang yang dibeli kemudian untuk dijual kembali, atau barang dan jasa yang habis dikonsumsi.

c. Penggunaan aset tetap

Penggunaan aset tetap karena adanya penurunan nilai karena terjadi pemakaian kerusakan sepanjang periode tertentu.

d. Bunga

Bunga timbul karena utang. Bunga harus dibayar atas kesepakatan Pemerintah dengan pihak lain.

e. Subsidi

Subsidi dipergunakan untuk pembayaran gaji berdasarkan level jabatan dalam organisasi daerah.

f. Tunjangan Sosial

Transfer antar rekening dengan tujuan melindungi rakyat terhadap resiko sosial tertentu. Resiko sosial menimbulkan tingkat kemiskinan dan mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga.

g. Belanja lain-lain

Pelayanan umum, pertahanan, ketertiban umum, lingkungan umum, pariwisata termasuk dalam kategori belanja lain-lain.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

2.1.3.2 Peranan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa otonomi daerah mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan kegiatan pemerintahannya dari tahun ke tahun selanjutnya. Hal ini disebabkan di samping adanya pertambahan penduduk yang pada gilirannya dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat juga disebabkan adanya kebocoran-kebocoran dari pengelolaan dana/pengalokasian dana. Untuk itu dapat memenuhi tambahan pengeluaran tersebut, maka Pemerintah Daerah

berusaha meningkatkan penerimaannya dalam batas yang wajar. Penerimaan yang wajar tersebut diharapkan mengalami peningkatan dari suatu tahun ke tahun selanjutnya, sehingga mampu mengatasi tambahan pengeluaran tersebut.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Pemerintah di daerah sebagian besar masih disubsidi atau dibantu oleh Pemerintah Pusat. Kemampuan keuangan daerah belum cukup untuk membiayai kegiatan pemerintahan sendiri, sehingga Pemerintah Daerah diharapkan untuk berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan posisi keuangannya guna memperluas status otonomi di daerahnya.

Untuk mewujudkan tercapainya otonomi daerah administrasi keuangan daerah harus disempurnakan, karena merupakan elemen yang penting dalam menentukan keberhasilan keuangan PEMDA. Dalam hal ini pelaksanaan yang dimiliki dari perencanaan anggaran yang sekaligus merupakan rencana kerja pemerintah dalam jangka pendek sampai tujuan yang diinginkan dalam jangka panjang tercapai. Dengan kegiatan yang dilakukan harus berpedoman pada anggaran yang ditetapkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal” telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi pembangunan daerah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Kesimpulan
1	(Bambang, 2013)	Variabel bebas: Pertumbuhan Ekonomi (X1), PAD (X2), DAU (X3) Variabel Terikat: Belanja Modal (Y)	Hubungan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2	(Diah Nurdiwat, 2017)	Variabel bebas: Pertumbuhan Ekonomi (X1), PAD (X2), Dana Perimbangan (X3), Lain-lain Pendapatan yang sah (X4) Variabel terikat: Belanja Modal (Y)	pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanj Modal, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal
3	(Rosita Prima, 2016)	Variabel Bebas: Belanja Modal (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2) Variabel Terikat: Kesejahteraan Masyarakat (Y)	(1) Belanja Modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, (2) Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, (3) Belanja Modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
4	(Setiawan Wisnu Asrul, 2015)	Variabel Bebas: Pertumbuhan Ekonomi (X1), PAD (X2), DAU (X3), DAK (X4), Variabel terikat: Dana Bagi Hasil (Y1), Belanja Modal (Y2)	Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sedangkan dana bagi hasil tidak mempunyai pengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

5	(Nurharibnu Wibisono, 2016)	Variabel Bebas : Pertumbuhan Ekonomi (X1), PAD (X2), DAU (X3) Variabel Terikat: Belanja Modal (Y)	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh positif terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal. Variabel PAD berpengaruh positif terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal. Variabel DAU tidak berpengaruh positif terhadap alokasi Anggaran Belanja Modal.
6	(Riko Novianto, 2015)	Variabel Bebas: PAD (X1), Dana Perimbangan (X2), Kinerja Keuangan (X3) Variabel terikat: Alokasi Belanja Modal (Y)	PAD, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1), dan Pendapatan Asli Daerah (X_2), terhadap Belanja Daerah (Y). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal

Pembangunan ekonomi dilandasi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah. Sarana dan prasarana yang diberikan akan berpengaruh positif terhadap berlangsungnya pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya infrastruktur untuk pembangunan daerah diberikan Pemerintah dengan menggunakan modal pembangunan yang disetor oleh pusat ke daerah atau

yang dihasilkan dari daerah untuk daerah. Pemberian sarana dan prasarana diharapkan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan kehidupan yang merata.

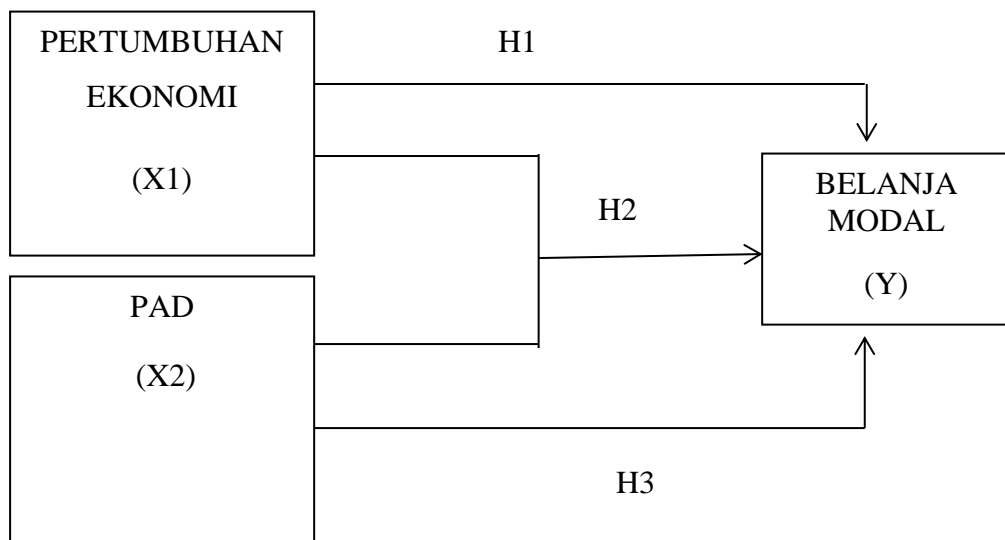
2.3.1 Hubungan PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan pada setiap daerah akan menarik para investor yang memberikan pengaruh positif bagi daerah. Batam dikenal dengan kawasan industri. Semakin banyak investor yang berinvestasi akan meningkatkan pendapatan bagi daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap Belanja Modal. Peningkatan Belanja Modal diharapkan mampu memberikan kenaikan gambaran Pendapatan daerah. Kualitas pelayanan publik terpenuhi dan tingkat prokontra lingkungan terkendali. Pembangunan fasilitas publik ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah dan salah satu program Pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian.

2.3.3 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pemerintah Pusat memberikan kesempatan bagi tiap daerah untuk berkembang. Transfer Dana dari pusat ke daerah adalah salah satu cara untuk mewujudkan kawasan yang mendatangkan calon investor. Dana yang diberikan dipergunakan untuk membiayai permintaan publik seperti perbaikan jalan, perbaikan gedung untuk umum dan bantuan sosial lainnya. Pembangunan infrastruktur akan membawa pengaruh positif bagi daerah. Pembangunan ekonomi akan menambah pendapatan bagi daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola infrastruktur umum dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

publik. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan meningkatkan investasi belanja modal Pemerintah Daerah sehingga peningkatan publik semakin membawa pengaruh positif.



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau berupa pernyataan yang akan di uji kebenarannya atas pertanyaan dalam masalah penelitian.

Hipotesis (H₁) : Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hipotesis (H₂) : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

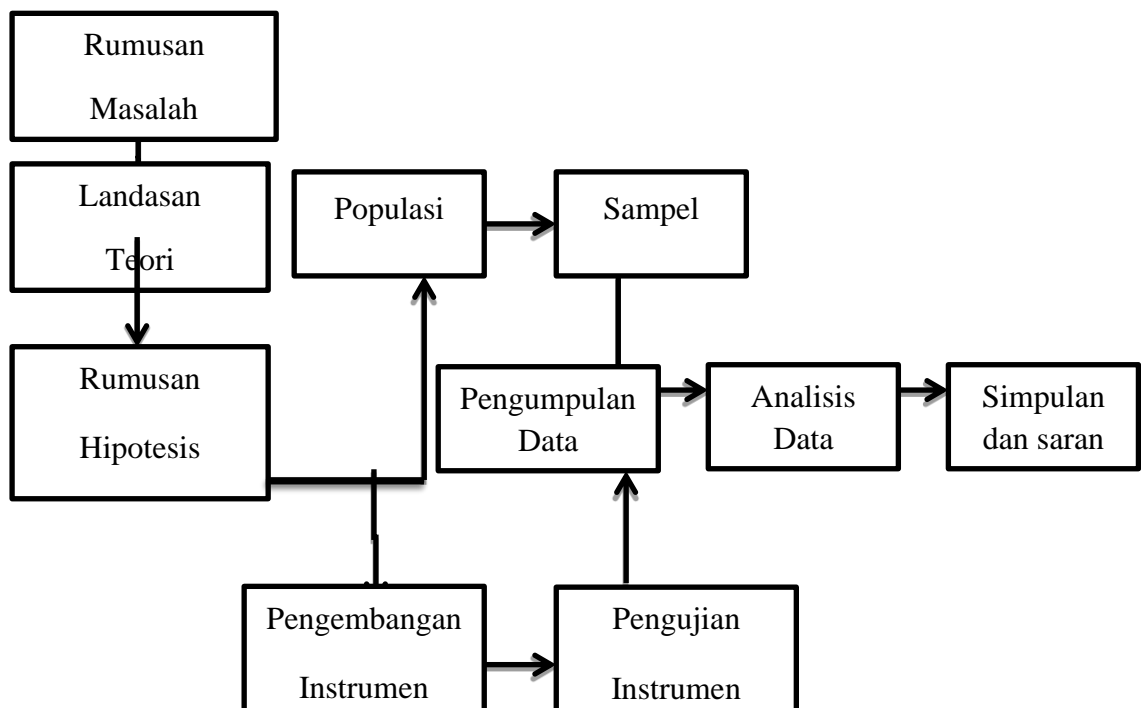
Hipotesis (H₃) : Diduga Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan Belanja Modal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2012:73) Desain penelitian merupakan suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset. Penelitian ini menggunakan metode data sekunder.



Gambar 3. 1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2012:39) variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dinamakan variabel karena ada variasinya.

3.2.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012:39). Sesuai dengan judul yang telah diambil yaitu “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (2011 – 2015), maka variabel dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil (Imam Harjanto, 2011:73). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan *output riil* per orang. Pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan perkapita. Perkembangan dinyatakan dalam persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Abdul Hafiz Tanjung, 2012:105) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh dari pendapatan pajak daerah, pendapatan

retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan penerimaan pemerintah lainnya yang sah dalam suatu tahun tertentu dan dinyatakan dalam rupiah.

3.2.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012:39). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Anggaran Belanja Modal.

3.2.2.1 Belanja Modal

Menurut (Abdul Hafitz Tanjung, 2012:105) Belanja Modal meliputi pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan aset lainnya yang memberi mamfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka membiayai kegiatan investasi. Total Belanja Modal yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai total yang terdapat dalam anggaran realisasi Belanja Modal yang diberikan ke daerah.

Adapun indikator dalam belanja modal (Y) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Tanah.

- b. Belanja Peralatan dan Mesin.
- c. Belanja Gedung dan Bangunan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:61). Jadi populasi bukan hanya meliputi orang tetapi juga objek atau subjek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan obyek yang diteliti.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Batam periode 2011-2015.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011:62). Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan di populasi dan sampel yang diambil dari populasi harus secara representatif. Dalam menentukan sampel yang diambil dari populasi penelitian, maka peneliti dapat menggunakan teknik pengambilan sampel. Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2011:66). Jenis *nonprobability Sampling* dalam penelitian ini adalah dengan metode *sampling jenuh*. *Sampling Jenuh* merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011:62).

Berdasarkan kriteria yang dipakai sebagai sampel dalam penelitian ini adalah realisasi anggaran pendapatan dan belanja, serta PDRB per Kapita dalam Rupiah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2012:137). Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Peneliti membaca dan mempelajari beberapa sumber tertulis yang ada, hal ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, aplikasi, dan teori-teori yang menggunakan bahan sebagai kajian pembanding skripsi yang dilakukan. Data yang diperoleh kemudian dipelajari, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data yang relevan. Sumber data yang diperoleh umumnya dari Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pusat Statistik yang sudah disusun arsip yang dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentar) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2009:147).

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Data sekunder peneliti peroleh dengan cara membaca membaca dan mempelajari beberapa sumber tertulis yang ada seperti buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian, hal ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan konsep, aplikasi, dan teori-teori dan menggunakan bahan ajar sebagai rujukan dan pembanding skripsi yang dilakukan.

3.4.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Pemerintah Kota Batam dan Dinas Pendapatan Daerah serta Badan Pusat Statistik. Menurut (Indriantoro dan

Supomo, 2009:147) Data Yang diperoleh umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2012:147) Analisis data yang digunakan yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian. Analisis data bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang informasi variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Data-data yang ada dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif, maksudnya semua data yang ada kaitannya dengan penelitian ini dibuat dalam suatu tabel kemudian diadakan penjelasan terhadap tabel-tabel tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Analisis data ini menggunakan alat bantu program SPSS versi 22.0

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis statistik adalah statistik yang digunakan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012:147).

Pada statistik deskriptif ini akan dikemukakan cara-cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun distribusi frekuensi, grafik garis maupun diagram lingkaran, pictogram, penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi atau mendeskripsikan dari variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta variabel dependen yaitu Belanja Modal.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi digunakan untuk memberikan pre-test, atau uji awal terhadap suatu perangkat atau instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, bentuk data dan jenis data yang akan diproses lebih lanjut dari suatu kumpulan data awal yang telah diperoleh, sehingga syarat untuk mendapatkan data yang tidak bisa menjadi terpenuhi atau, sehingga prinsip *Best Linier Unbiased Estimator* atau *BLUE* terpenuhi .

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah nilai residu (perbedaan yang ada) yang diteliti memiliki distribusi normal atau tidak normal. Nilai residu yang berdistribusi normal akan membentuk suatu kurva yang kalau digambarkan akan berbentuk lonceng, *bell-shaped curve*.

Uji ini dilakukan jika data memiliki skala ordinal, interval maupun rasio dan menggunakan metode parametrik dalam analisisnya. Jika data tidak berdistribusi normal dan jumlah sampel kecil kemudian jenis data nominal atau ordinal maka metode analisis yang paling sesuai adalah statistik non-parametrik.

Kedua sisi kurva melebar sama tidak terhingga. Suatu data dikatakan tidak normal jika memiliki nilai data yang ekstrim, atau biasanya jumlah data terlalu sedikit.

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan Histogram Regression Residual yang sudah distandarkan, analisis Chi square dan juga menggunakan nilai Kolmogorov-Smirnov. Kurva nilai residual terstandarisasi dikatakan normal jika : Nilai Kolmogorow – Smirnov $Z < Z_{tabel}$ atau menggunakan nilai Probability Sig (2 tailed) $> \alpha$; sig $> 0,05$ (Wibowo, 2012:62).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Didalam persamaan regresi tidak boleh terjadi multikolinieritas, maksudnya tidak boleh ada kolerasi atau hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas yang membentuk persamaan tersebut. Jika pada model persamaan tersebut terjadi gejala multikolinearitas itu berarti sesama variabel bebasnya terjadi korelasi.

Suatu model dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 , angka ini dilihat pada tabel *Coefficient*. Dapat juga menarik kesimpulan dengan cara melihat dalam tabel *Coefficient Correlation*, suatu model dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai kolerasi antara variabel independennya $< 0,5$.

Metode yang dapat digunakan adalah dengan mengkorelasikan antara variabel bebasnya, *Output* regresi yang nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Priyatno, 2012:93).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas diperlukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Suatu model dikatakan memiliki problem heteroskedastisitas artinya terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian residual pada pengamatan model regresi tersebut.

Uji heteroskedastisitas akan digunakan uji *Park Gleyser* dengan cara mengkorelasikan nilai *absolute residualnya* dengan masing-masing variabel independen. Jika hasil nilai probabilitasnya memiliki nilai signifikansi $>$ nilai alpha-nya (0,05), maka model tidak terjadi heteroskedastisitas (Wibowo, 2012:93).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Menurut (Duwi Priyatno, 2016:139) Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan yang lain disusun menurut runtun waktu. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, cross section atau time-series. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan yang lain pada model. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Dalam penelitian ini akan digunakan uji autokorelasi dengan menggunakan metode yang paling umum digunakan yaitu metode durbin-Watson.

Menurut (Wibowo, 2012:101) nilai kritis yang digunakan adalah default spss = 5%. Cara yang digunakan adalah dengan menilai tingkat profitabilitas, jika $> 0,05$, berarti tidak ada terjadi autokorelasi dan sebaliknya. Dalam pembahasan kali ini digunakan uji autokorelasi dengan menggunakan metode yang paling umum yaitu metode Durbin-Watson.

Tabel 3.2 Tabel Durbin Watson

Durbin – Watson (DW)	Kesimpulan
$< d_l$	Terdapat autokorelasi (+)
d_L sampai dengan d_U	Tanpa kesimpulan
d_U sampai dengan $4 - d_U$	Tidak terdapat autokorelasi
$4 - d_U$ sampai dengan $4 - d_L$	Tanpa kesimpulan
$4 - d_L$	Ada autokorelasi

Kesimpulan yang dapat dilakukan dengan asumsi dan bantuan dua buah nilai dari tabel Durbin-Watson diatas yaitu nilai d_L dan nilai d_U pada K tertentu, K = jumlah variabel bebas dan pada n tertentu = jumlah sampel yang digunakan. Kesimpulan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada nilai Durbin-Watson berada pada range nilai d_U hingga $(4-d_U)$ maka ditarik kesimpulan bahwa model tidak terdapat autokorelasi.

3.5.3 Uji Pengaruh

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear adalah analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dengan menggunakan persamaan

linear, jika menggunakan lebih dari satu variabel independen disebut dengan analisis regresi linear berganda (Duwi Priyatno, 2016:47). Model analisis ini untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), dan PAD (X_2) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y).

Analisis ini memiliki perbedaan dalam jumlah variabel independen yang merupakan variabel penjelas jumlahnya lebih dari satu buah. Variabel penjelas yang lebih dari satu buah inilah yang kemudian akan dianalisis sebagai variabel-variabel yang memiliki hubungan-pengaruh, dengan, dan terhadap variabel yang dijelaskan atau variabel independen.

Dari hasil regresi yang diperoleh kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang diperoleh mempunyai pengaruh yang positif atau tidak, baik secara simultan maupun parsial dan mengetahui seberapa besar pengaruhnya.

Model dasar yang digunakan adalah model regresi linier berganda dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y' = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_n X_n$$

Keterangan : Y = Likuiditas

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X_1 = Pertumbuhan Ekonomi Daerah

X_2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_n = Variabel independen ke – n

Rumus 3. 1 Regresi linear

3.5.4 Uji Hipotesis

Menurut (Priyatno, 2012:139) uji t koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05 dan 2 sisi. Kriteria pengujian adalah jika $t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$, maka H_0 diterima dan jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak. Kriteria untuk menentukan nilai t tabel dalam tabel statistik dengan taraf signifikan 0,05 dan 2 sisi dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$.

Penelitian ini merupakan proses memberi jawaban terhadap masalah yang dimunculkan, dengan analogi ini maka suatu penelitian mengharuskan keberadaan masalah. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi. Signifikansi artinya meyakinkan atau hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diperlakukan pada populasi. Jika tidak signifikan berarti kesimpulan pada sampel tidak berlaku pada populasi (tidak dapat digeneralisasikan) atau hanya berlaku pada sampel saja. tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Artinya risiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak 5% dan benar dalam mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).

Dalam melakukan suatu penelitian, biasanya terdapat dua uji hipotesis yaitu Hipotesis Nol atau sering disebut H_0 dan Hipotesis Alternatif atau yang sering disebut H_a . Hipotesis penelitian sering disebut juga sebagai hipotesis alternatif, ini merupakan pernyataan dari apa yang diharapkan akan terjadi dan bukan dari apa yang diharapkan tidak akan terjadi. Sedangkan hipotesis nol adalah pernyataan

yang menunjukkan tidak ada perubahan atau perbedaan. Pengujian hipotesis yang dilakukan akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Uji hipotesis merupakan uji menggunakan data sampel.
- b. Uji menghasilkan keputusan menolak H_0 atau sebaliknya menerima H_0 .
- c. Nilai uji dapat dilihat dengan menggunakan nilai F atau nilai t hitung maupun sig.
- d. Pengambilan kesimpulan dapat pula dilakukan dengan melihat gambar atau kurva, untuk melihat daerah tolak dan daerah terima suatu hipotesis nol.

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah uji signifikansi secara bersama-sama koefisien determinasi (R^2), uji statistik (F), dan uji signifikansi parameter individu.

3.5.4.1 Uji T (Parsial)

Menurut (Priyatno, 2012:139) Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X_1, X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah

H_0 = Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

H_a = Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap alokasi modal.

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H_0 = Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal

H_a = Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal

Hasil uji t dapat dilihat pada output SPSS pada tabel *Coefficients* dari hasil analisis regresi linier berganda.

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan sebagai berikut:

1. H_0 diterima jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ atau signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima H_2 ditolak yang berarti bahwa masing-masing independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. H_0 ditolak jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak, H_2 diterima yang berarti bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) (Priyatno, 2012:139).

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

H_0 = Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Belanja Daerah.

H_a = Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal.

Hasil uji F dapat dilihat pada output SPSS pada tabel *ANOVA* dari hasil analisis regresi linier berganda. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti bahwa secara variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti bahwa secara variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- c. Jika $P\text{-value} \geq \alpha (0,005)$ maka H_0 diterima, H_a ditolak yang berarti bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.
- d. Jika $P\text{-value} < \alpha (0,05)$ maka H_0 ditolak, H_a diterima yang berarti semua variabel independen signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R square (R^2) atau kuadrat R, yaitu menunjukkan nilai koefisien determinasi yang artinya presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbuangan pengaruh variabel bebas dalam model regresi yang secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap bebas (Wibowo, 2012:136).

3.6. Lokasi Penelitian

Berdasarkan kriteria yang dipakai sebagai sampel adalah Kabupaten dan Kota di Batam yang memiliki pendapatan daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri dimana Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kota di Kepulauan

Riau, Batam yang mempublikasikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja serta Badan Pusat Statistik secara konsisten dari tahun 2011 - 2015.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Nama Kegiatan	Sep-17				Okt-17				Nop-17				Des-17				Jan-18			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penentuan judul	■																			
Pendahuluan Penelitian					■															
Tinjauan pustaka dan pengumpulan data									■											
Pelaksanaan penelitian													■							
Pengumpulan data																	■			

Sumber : Penulis